PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 71 TAHUN 2022
TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PADA DINAS DAN
BADAN DAERAH

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penjelasan ini dapat diselesaikan. Penjelasan ini ditujukan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah.

Uraian tugas memberikan kejelasan mengenai apa yang di harapkan dalam menjalankan jabatannya, termasuk tugas pokok dan fungsi, serta wewenang yang dimilikinya. Uraian tugas ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

Penjelasan Raperbup ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Uraian tugas jabatan yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan membantu mencapai tujuan organisasi. Uraian tugas yang jelas dan terperinci sangat penting bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta bagi organisasi untuk mengelola kinerja dan sumber daya manusia secara efektif. Dengan adanya uraian tugas yang baik, diharapkan ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional, sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi dan masyarakat Uraian tugas yang jelas dan terperinci sangat penting bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta bagi organisasi untuk mengelola kinerja dan sumber daya manusia secara efektif. Dengan adanya uraian tugas yang baik, diharapkan ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional, sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi dan masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah ini masih jauh dari sempurna, maka kami terbuka untuk masukan dan saran dalam rangka perbaikan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah ini.

Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas jabatan sehingga dapat bermanfaat bagi organisasi dan menjadi pedoman.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN KARANGANYAR,

ARIS KURNIAWAN, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19750503 200501 1 009

DAFTAR ISI

JUDUL .....
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah .....
C. Tujuan Penyusunan .....
D. Dasar Hukum .....
BAB II POKOK PIKIRAN .....
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....
B. Ruang Lingkup Materi .....
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .....
B. Saran .....
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang menetapkan struktur dan tata hubungan kerja dalam suatu organisasi, secara otomatis akan mengubah rincian tugas dan tanggung jawab setiap individua tau unit kerja. Jika ada perubhaan dalam struktur organisasi, seperti penggabungan atau pemisahan bagian, penambahan atau pengurangan posisi, atau perubahan hierarki, maka uraian tugas yang berkaitan dengan posisi atau unit kerja yang berubah juga akan mengalami penyesuaian.

Uraian tugas memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari setiap jabatan, termasuk tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, dapat dihindari terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih atas duplikasi antara satu jabatan dengan jabatan lainnya.

Perubahan uraian tugas jabatan pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. untuk untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
2. perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdampak pada uraian tugas yang harus diemban oleh individu atau unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah adalah untuk mengatur pedoman dalam melaksanakan uraian tugas yang jelas dan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 102);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 105);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 108);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 111);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 113);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 114);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 115);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 116);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 117);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 118);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 120);
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 121);
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2026 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun.... Nomor ....);

BAB II
POKOK PIKIRAN

1. Pemetaan tugas dan tanggung jawab
   Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah memberikan pedoman dalam pemetaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur untuk masing-masing jabatan, berdasarkan fungsi dan tugas organisasi. Uraian tugas yang jelas dan terukur untuk masing-masing jabatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pemetaan tugas yang baik, diharapkan organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik, uraian tugas perlu disesuaikan agar lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya reorganisasi atau perubahan nomenklatur jabatan dalam suatu organisasi perangkat daerah berdampak pada uraian tugas.

2. Mencegah tumpang tindih dan konflik
   Dengan adanya uraian tugas yang jelas setiap jabatan memiliki batasan dan tanggung jawab yang spesifik. Hal ini mencegah terjadinya pekerjaan yang dobel atau bahkan terabaikan karena tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Sangat penting untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil ketika menghadapi tumpang tindih pekerjaan. Dengan uraian tugas yang jelas, potensi terjadinya tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalisir.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan memiliki sasaran, jangkauan dan arah mengatur sebagai berikut:

1. Sasaran
   Sasaran dari tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Jangkauan
   Jangkauan tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah adalah Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Arah Pengaturan
   Arah pengaturan dokumen Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah adalah untuk menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan perubahan kebijakan, kebutuhan pelayanan, atau struktur organisasi yang baru.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Bupati merupakan rangkaian rumusan normative yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan pelaksanaan uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan pengawas pada Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sistematika Batang Tubuh Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas atau Badan, meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Pasal I berisi tentang ketentuan dalam Peraturan Bupati dan dituangkan dalam lampiran.
2. Pasal II berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati dan perintah penempatan Peraturan dalam Lembaran Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah diperlukan karena mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi masing-masing jabatan pada Perangkat Daerah terkait.

B. Saran

Demi kelancaran pelaksanaan tugas yang jelas pada masing-masing jabatan maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah perlu di sinkronisasi dan harmonisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.